

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- _____. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2000.
- Arinanto, Satya, Ninuk Triyanti. *Memahami Hukum: dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Arisman, Rasyid, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015.
- Asian Infrastructure Investment Bank. *Enviromental and Social Framework*. Beijing: Asian Infrastructure Investment Bank. 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Bruggink, J.J.H.. *Refleksi Tentang Hukum, terj. Bernard Arief Sidharta*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Effendi, Ardianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Effendy, Marwan. *Korupsi dan Strategi Nasional: Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi. 2013.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press. 2013.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Finland Ministry of Justice. *Impact Assessment in Legislative Drafting*. Helsinki: Finland Ministry of Justice. 2008.

- Friedman, Lawrence M.. *American Law*. United States of America: Norton and Company. 1984.
- _____. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Friedman, W.. *Law in a Changing Society*. New York: Columbia University Press. 1972.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2019.
- General Secretariat of the Government of Federation of Bosnia and Herzegovina. *Regulatory Impact Assessment Manual*. Sarajevo: General Secretariat of the Government of Federation of Bosnia and Herzegovina. 2014.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Hamzah, Andi, R.M. Surachman. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Harahap, Diah Ratu Sari. "Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin." *Proceeding Demokrasi dan Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Universitas Nasional. 2018.
- Hart, H.L.A.. *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni. 2006.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2014.
- Husein, Yunus, Roberts K.. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press. 2021.
- Husen, Harun M.. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.

- International Monetary Fund. *Financial Intelligence Units: An Overview*. Washington DC: International Monetary Fund. 2004.
- Irman, Tb.. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing. 2007.
- Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press. 2020.
- K. Valerine, J.L.. "Bab I: Pendahuluan." *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, ed. Valerine J.L.K.. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015.
- van Kan, J., H. Beekhuis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pembangunan. 1972.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Kanter, E.Y.. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1992.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terj. Somardi. Jakarta: Bee Media. 2007.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015.
- Kian, AM. Laot. *Berkelana dalam Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kepel Press. 2013.
- Kirkham, Richard L.. *Teori-Teori Kebenaran: Pengantar Kritis dan Komprehensif*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1997.
- MD, Mahfun. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Mangunhardjana, A.. *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Manthovani, Reda, Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Malibu. 2011.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Marizan, Prima Idwan. *Penelusuran Aliran Uang: Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang*. Malang: Setara Press. 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.

- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Mill, John Stuart. *On Liberty, Utilitarianism and Other Essays*. Oxford: Oxford University Press. 2015.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Palguna, I.D.G.. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2019.
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tanpa tahun.
- Poland Ministry of Economy. *Guidelines for the Regulation Impact Assessment (RIA)*. Warsawa: Ministry of Economy. Tanpa tahun.
- Pospisil, Leopold. *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif*, terj. Derta Sri Wedowatie. Bandung: Nusamedia. 2016.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab. Jakarta: Bhratara. 1996.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- _____. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia. 2010.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2017.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Rencana Strategis PPAATK Tahun 2020-2024*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2020.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*, terj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius. 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- _____. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas. 2009.
- _____. *Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Ramli, Lany. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." *Metode Penelitian Hukum: Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S2*. Bagian I, ed. Valerine, J.L.K.. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Rodiyah, Salim HS. *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Ruslan, Ranggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press. 2009.
- Sartre, Jean Paul. *Seks dan Revolusi*, terj. Silvester G. Sukur. Yogyakarta: Narasi. 2016.
- Scholten, Paul. *Algemeen Deel*. Belanda: Digital Paul Scholten Project. 2015.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan. 2002.
- Sidharta, Bernard Arief. "Struktur Ilmu Hukum." *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, ed. Esmi Warassih, et. al.. Yogyakarta: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP. 2012.
- _____. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Soedirman Center for Global Studies. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press. 2020.
- Soekanto, Soerjono, Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2007.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Katholik Atma Jaya. 2017.

- Surachman, R.M., Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Suryajaya, Martin. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*. Serpong: Margin Kiri. 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Suteki, Gilang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press. 2018.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Tanya, Bernard L., et. al.. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Tresna, R.. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD. 1979.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2006.
- Tyler, Tom R.. *Why People Obey The Law: Do We Obey The Law Because We Fear We Will Be Punished? Or Because We Think The Courts and Police Are Usually Fair? Do Most People Care More About Whether They Win or Lose, About Having The Legal System Treat Them With Dignity*. Michigan: Yale University Press. 1990.
- Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. *Draft Buku Panduan Analisa Dampak Kebijakan*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2018.
- _____. *Laporan Hasil Cost Benefit Analysis (CBA) Terhadap Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 tahun 2010 tentang Model Pedoman Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2018.
- Utama, Paku, Vauline Frilly. *Anti-Gatekeeper dan Investigasi Forensik*. Tangerang: Wikrama Utama Indonesia. 2018.
- Utrecht, E.. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1983.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonsia Jakarta, ed. Teuku Amir Hamzah, dkk*. Jakarta: Ind-Hill.co.. 2003.
- Wignjosubroto, Soetandyo. “Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah.” *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto, Shidarta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.

- _____. "Ragam-Ragam Penelitian Hukum." *Metode Penelitian Hukum: Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S2, Bagian I*, ed. Valerine J.L.K.. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015.
- Yusuf, Muhammad. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima. 2014.

Kamus

- Badudu, J.S.. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing, Co.. 1990.
- Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat, terj.* Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Hornby, A.S.. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press. 2000.
- Mudhofir, Ali. *Kamus Filsuf Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Jurnal

- Anwar, Mashuril, *et. al.*, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas." *SASI*, Vol. 27, No. 2, April-Juni 2021. Universitas Pattimura. 2021: 126-135.
- Dimiyati, Khudzaifah, Kelik Wardiono. "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Maret 2007. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007: 1-24.
- Firdausy, Sunny Ummul, Rizal Abdurrahman. "Analisis Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Res Publica*, Vol. 1, No. 3, September – Desember 2017. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2017: 85-98.
- Hendra. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Asal." *Solusi*, Vol. 19, No. 3, September 2021. Fakultas Hukum Universitas Palembang. 2021: 391-411.
- Karaseran, Instary O.. "Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, Juni 2015. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2015: 72-78.

- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Riau. 2013: 1-14.
- Kusumawati, Yulia, Made Surya Putra. "Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Interaksional Terhadap Perilaku Retaliasi Karyawan." *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 4, No. 3. Universitas Udayana. 2015: 731-749.
- Makauli, Noula Hillary. "Kewenangan Penyidik POLRI dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, Februari 2016. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2016: 149-157.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, Maret 2006. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2006: 85-97.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, September – Desember 2014. Universitas Islam Sultan Agung. 2014: 267-286.
- Muslih, M.. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Hukum Gustav Radbuch," *Legalitas*, Vol. IV No. 1, Juni 2013, 2013: 130-152.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2014: 118-130.
- Nurhadianto, Lucky. "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2010. Universitas Indonesia. 2010: 159-181.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia." *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015. Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2015: 41-57.
- Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?." *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, Maret 2006. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2006: 38-51.
- Sibuea, Harris Y.. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejarahan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Dewan Perwakilan Rakyat. 2016: 123-143.
- Sudaryatmi, Sri. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2012: 572-578.
- Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 9, No. 2. Universitas Malikussaleh. 2014: 1-16.

- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST": Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012." *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No.3, Desember 2014. Komisi Yudisial. 2014: 213-235.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, April 2010. Universitas Islam Indonesia. 2010: 217-232.
- Tobing, Fredy Buhama Lumban. "Aktivitas Drug Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara." *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol, 5, No. 1, September 2002, Universitas Indonesia. 2002: 75-86.

Penelitian

- Anggraini, Fitrin. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan *Account Representative* dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara)". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Working Paper*. Kendari: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanpa tahun.
- Binawan, Andang, Tanius Sebastian. "Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial." *Kerja Kerja Epistema No. 07/2012*. Jakarta: Epsitema Institute. 2012.
- Budoyo, Supto. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana." *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Diantha, I Md Pasek. "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif." *Penelitian*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015.
- Fanggidae, Viktor E.. "Aspek Hukum Perencanaan dan Evaluasi POJK Berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas POJK." *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2018.
- Fuat, Muhammad. "Mengenai Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana." *Makalah*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2014.
- Mulyata, Jaka. "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Tesis*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015.

- Pratama, Fauzi. "Penentuan Delik Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Keadilan." *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2021.
- Setya, Agung. "Dukungan POLRI dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Makalah*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanpa tahun.
- Sidharta, Bernard Arief. "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis." *Makalah dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 10 Februari 1998*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pusat Kajian Ilmu Hukum Indonesia Bagian Tengah. 1998.
- Soetopo, Maria G.S.. "Economic Analysis of Law dalam Hukum Pidana Dimasa Pandemi." *Makalah*. Bogor: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. 2021.
- Wijanarko, Panji. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibir-Chandra oleh Jaksa Agung)." *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

Paparan

- Karim, Said. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Bahan Paparan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa tahun.
- Saputra, Rian Prayudi. "Hukum Pidana Khusus." *Bahan Paparan*. Kampar: Universitas Pahlawan. Tanpa tahun.
- Soetopo, Maria G.S.. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM." *Paparan di Universitas Indonesia tanggal 2 dan 9 September 2019*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2019.
-
- _____. "Legal Research Methodology: Economic Analysis of Law." *Paparan pada Program Doktor Hukum Universitas Indonesia 25 November 2019*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2019.
-
- _____. "Peran Analisis dan Evaluasi Peraturan dalam Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM." *Paparan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 17 Februari 2022*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi & Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2022.
-
- _____. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." *Paparan pada Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan 1 November 2021*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2021.

_____. “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi.” *Paparan pada Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan 21 Februari 2022*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2022.

Publikasi Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Tabel 1: Perbandingan Jumlah LKTM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2019.” *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Desember 2019. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2019: 4.

Internet

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Banjar Baru. “Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*).” <https://bappeda.banjarbarukota.go.id/2015/01/15/perencanaan-strategis-strategic-planning/>. 15 Januari 2015.

Bedahbisnis.id. “*Present Value* (PV) / Nilai Saat Ini.” <https://bedahbisnis.id/artikel/present-value-pv-nilai-saat-ini>. 9 November 2020.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. “Perkembangan Teknologi Informasi Ibarat Dua Mata Pisau.” <https://polkam.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-ibarat-dua-mata-pisau/>. 28 Oktober 2019.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. “Pengantar Presiden Republik Indonesia – Rapat Terbatas tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak, Kantor Presiden, Jakarta, 21 Maret 2016,” https://www.setneg.go.id/baca/index/pengantar_presiden_ri_-_ratas_tentang_pencucian_uang_jakarta_21_maret_2016. 21 Maret 2016.

CNBC Indonesia. “Indra Kenz Berulah, Pindahkan Uang Hingga Hilangkan Barbuk.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220318082344-4-323801/indra-kenz-berulah-pindahkan-uang-hingga-hilangkan-barbuk>. 18 Maret 2022.

_____. “Sederet Tingkah yang Menunjukkan Indra Kenz Tidak Kooperatif.” <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220317153202-21-323654/sederet-tingkah-yang-menunjukkan-indra-kenz-tidak-kooperatif>. 17 Maret 2022.

Cahyaningsih, Diana Tantri. “Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot.” [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf). 27 Maret 2020.

- Colinallen.danalias.org. "Excerpts from Raymond Williams, Keywords." https://colinallen.dnsalias.org/Courses/2004-2005_Fall/X755/Readings/williams-keywords.html. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Delianoor, Nandang Alamsah, Sigid Suseno. "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus." <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf>. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Egmont Group. "About." <https://egmontgroup.org/content/about>. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Fardi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Belum Efektif." <https://law.ugm.ac.id/en/penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum-efektif/>. 8 Agustus 2016.
- Felisiani, Theresia. "Kerjasama Interpol, Bareskrim Buru Dua DPO Korupsi Bank Century." <https://m.tribunnews.com/nasional/2016/04/22/kerjasama-interpol-bareskrim-buru-dua-dpo-korupsi-bank-century?page=all>. 22 Agustus 2016.
- Hadinagoro, Suharyono S.. "Reduksi Ego Sektoral dan Perkuat Sinergi Demi Produktivitas Nasional." <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200606090752gv6KxImoQa>. 6 Juni 2020.
- Harmony. "Rencana Strategis: Pengertian, Konsep dan Tahapan Penerapannya." <https://www.harmony.co.id/blog/rencana-strategis-pengertian-konsep-dan-tahapan-penerapannya>. 15 Februari 2022.
- Hukumonline.com. "Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang." <https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt510a46a7325da?page=3>. 31 Januari 2013.
- _____. "Menggali Karakter Hukum Progresif." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>. 2 Desember 2013.
- Irp.fas.org. "Money Laundering." <https://irp.fas.org/news/1998/06/laundry.htm>. Mei 1998.
- Jainudin, Jeje. "Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna%20NKRI%20-%20DWI/index.html>. 2019.
- Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Ego Sektoral Masih Jadi Hambatan Terbesar Wujudkan Sinergitas dan Kolaborasi." <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5215-ego-sektoral-masih-jadi-hambatan-terbesar-wujudkan-sinergitas-dan-kolaborasi>. 20 November 2020.
- Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah: Sebelum Reformasi." https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3. Tanpa tanggal, tanpa tahun.

- Kementerian Keuangan. “Lelang Bersifat Lex Specialis.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html>. 23 September 2018.
- Kementerian Keuangan. “Tugas dan Fungsi.” <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>. 2020.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Menkominfo: Ego Sektoral adalah Musuh Bersama.” https://kominfo.go.id/content/detail/5829/menkominfo-ego-sektoral-adalah-musuh-bersama/0/sorotan_media. 26 Agustus 2015.
- Kompas.com. “Kasus Judi di Riau, Ada Persaingan di Internal Polri?”. <https://bandung.kompas.com/read/2008/12/04/23171826/kasus-judi-di-riau-ada-persaingan-di-internal-polri>. 4 Desember 2008.
- Lumanouw, Novy. “Jokowi Kembali Ingatkan K/L Tidak Lagi Kedepankan Ego sektoral.” <https://www.beritasatu.com/nasional/355997/jokowi-kembali-ingatkan-kl-tidak-lagi-kedepankan-ego-sektoral>. 21 Maret 2016.
- Mardatillah, Aida. “Dua Pasal TPPU Minta Ditafsirkan Seperti Ini.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-tppu-minta-ditafsirkan-seperti-ini-lt5ba353af52ea3?page=1>. 20 September 2018.
- The Mob Museum. “Meyer Lansky.” https://themobmuseum.org/notable_names/meyer-lansky/. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Rezim APU PPT Internasional.” <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Internasional.aspx>. 2019.
- Paath, Carlos K.Y.. “Presiden Fokus Pemberantasan Pencucian Uang.” <https://www.beritasatu.com/nasional/356049/presiden-fokus-pemberantasan-pencucian-uang>. 22 Maret 2016.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan.” https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html. 3 Juli 2019.
- Rasidi, Didi. “Kajian Perencanaan.” <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan>. 18 Agustus 2011.
- Sadar Pajak. “Sekilas tentang DJP.” <https://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/siapakah-djp.html>. 22 September 2016.
- Safitri, Eva. “PPATK Terima 73 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama 2021.” <https://news.detik.com/berita/d-5922354/ppatk-terima-73-ribu-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-selama-2021#:~:text=Pusat%20Pelaporan%20dan%20Analisis%20Transaksi,ribu%20laporan%20transaksi%20keuangan%20mencurigakan>. 31 Januari 2022.

- Samsara, Ladiatno. “Mencari Solusi Konkret, Mengatasi Ego Sektoral.” <https://birokratmenulis.org/mencari-solusi-konkret-mengatasi-ego-sektoral/>. 17 Juli 2020.
- Saputra, Fajar Adi. “Penegakan Hukum, KPK Ingatkan APH Buang Ego Sektoral.” <https://pontas.id/2021/10/12/penegakan-hukum-kpk-ingatkan-aph-buang-ego-sektoral/>. 12 Oktober 2021.
- Sembiring, Lidya Julita. “Wow! Potensi Pencucian Uang Perpajakan di 2020 Tembus Rp 20 T.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114113219-4-215869/wow-potensi-pencucian-uang-perpajakan-di-2020-tembus-rp-20-t>. 14 Januari 2021.
- Shidarta. “Apa itu Budaya Hukum?”. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>. Oktober 2019.
- Stefanie, Christie. “Jokowi Minta POLRI Hilangkan Ego Sektoral.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701194141-20-142504/jokowi-minta-polri-hilangkan-ego-sektoral>. 1 Juli 2016.
- Sudewo, Perdhana Ari. “Mentalitas Silo dan Ego Sektoral, Penyakit Kronis yang Belum Sembuh.” <https://kumparan.com/perdhana-ari-sudewo/mentalitas-silo-dan-ego-sektoral-penyakit-kronis-organisasi-yang-belum-sembuah-1wSh25y4KI7/full>. 4 September 2021.
- Suhanda. “Jaksa Agung: Tidak Boleh Ada Ego Sektoral.” <https://rri.co.id/nasional/hukum/1320406/jaksa-agung-tidak-boleh-ada-ego-sektoral>. 10 Januari 2022.
- Suwiknyo, Edi. “Kasus Pencucian Uang Korupsi Sektor SDA Tembus Rp 37,8 Triliun.” [https://kabar24.bisnis.com/read/20210824/16/1433256/kasus-pencucian-uang-korupsi-sektor-sda-tembus-rp378-triliun#:~:text=Praktik%20pencucian%20uang%20hasil%20tindak,alam%20mencapai%20Rp37%2C8%20triliun.&text=Angka%20itu%20dipaparkan%20oleh%20lembaga,Assessment%20\(NRA\)%20tahun%202021](https://kabar24.bisnis.com/read/20210824/16/1433256/kasus-pencucian-uang-korupsi-sektor-sda-tembus-rp378-triliun#:~:text=Praktik%20pencucian%20uang%20hasil%20tindak,alam%20mencapai%20Rp37%2C8%20triliun.&text=Angka%20itu%20dipaparkan%20oleh%20lembaga,Assessment%20(NRA)%20tahun%202021). 24 Agustus 2021.
- Tempo.co. “CGI Jadi Andalan Utang Setelah IMF.” <https://bisnis.tempo.co/read/30634/cgi-jadi-andalan-utang-setelah-imf>. 18 November 2003.
- Topan, Rendra. “Transaksi Keuangan.” <https://rendratopan.com/2019/04/25/transaksi-keuangan-mencurigakan-menurut-undang-undang/>. 25 April 2019.
- Trisnawati, Putri Ayu. “Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” <https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>. 28 November 2019.
- Ulum, Miftahul. “Uang Narkoba Berputar di Indonesia Rp 120 Triliun, Ini Penjelasan PPAATK.” <https://kabar24.bisnis.com/read/20211006/16/1451424/uang-narkoba-berputar-di-indonesia-rp120-triliun-ini-penjelasan-ppatk>. 6 Oktober 2021.

Waseso, Ratih. “Sepanjang 2020, PPAK Terima 68.057 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.” <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2020-ppatk-terima-68057-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan>. 24 Maret 2021.

Weiser, Kathy. “Al Capone – Leading the Chicago Outfit.” <https://www.legendsofamerica.com/20th-alcapone/>. Maret 2019.

Wismabrata, Michael Hangga. “Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang, “Dirty Money” yang Jerat Doni Salmanan.” <https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/093807478/mengenal-tindak-pidana-pencucian-uang-dirty-money-yang-jerat-doni-salmanan>. 15 Maret 2022.

Zaman, Muhamad Nafi Uz. “Hukum Progresif: Hukum Progresif Sebagai Terobosan dalam Memandang Hukum.” <https://heylawedu.id/blog/hukum-progresif-hukum-progresif-sebagai-terobosan-dalam-memandang-hukum>. 24 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyediaan Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.02/PPATK/09/2012 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15 Tahun 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyediaan Jasa Keuangan.

Standard Operasional Prosedur Nomor SOP/10/I/2011/Dit.Tipdeksus tanggal 11 Januari 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK.

Konvensi dan Perjanjian Internasional

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988.

United Nations Against Transnational Organized Crime 2000.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.